

Editor: Edi Santoso

GAGASAN KOMUNIKASI UNTUK NEGERI



Jurusan Ilmu Komunikasi
Universitas Jenderal Soedirman

GAGASAN KOMUNIKASI UNTUK NEGERI

Editor: Edi Santoso

**JURUSAN ILMU KOMUNIASI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

GAGASAN KOMUNIKASI UNTUK NEGERI

Penulis:

Hanny Hafiar, Eko Sugiharto, Dede Suprayitno, Maria Puspitasari, Reza Abineri, Mohammad Jhanattan, Rahardian Shandy, Epi Handayani, Ardiansyah Putra, Nicolaus Simon, Fitria Harmeliani, Sunarto Prayitno, Syaifa Wulan, Sharon Claudia, Purwadi, Nuryanti, Dewi Kurniawati, Shinta Prastyanti, Andy Purwana, Aulia Nur, Setiawan Wahyudi, Dyah Ayu, Wininda Qusnul K., Andri Pratama, Iman Santoso, Elva Tri Lestari, Aricha Choirunnisah, Siti Khaeromah, Gumilar, Lalang Pradistia, Astrid Devitasari, Analis Hasby, Rani Anggraeni, Annisa Ayu, Alfian Biroli, Dani Nurdiansyah, Alfian Biroli, Rofiq Anwar, Tri Susanto, Ida Wiendijarti, Dewi Novianti, Cheria Ayu, Fenny Ayuwardhani, Setyo Rahyunanto, Melisa Indriana, Elva Tri Lestari, Adinda Dea, Alfian Biroli, Zhelda Shaellia, Anggun Rahmawati, S. Bakti Istiyanto

Reviewer :

S. Bakti Istiyanto, Mite Setiansah, Agoeng Noegroho, Wisnu Widjanarko, Wiwik Novianti, Toto Sugito, Nuryanti

ISBN: 978-623-92303-5-7

Editor: Edi Santoso

Desain Sampul dan Tata Letak: Rahmat Basuki

Penerbit: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed

Redaksi:

Jl HR Bunyamin 993 Purwokerto 53122
Telepon (0281) 622510 Fax (0281)636992
Email: komunikasi@unsoed.ac.id

Cetakan Pertama, September 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Tak ada ruang kehidupan yang berlalu tanpa kehadiran komunikasi. Maka membicarakan komunikasi sejatinya adalah membicarakan kehidupan itu sendiri. Inilah alasan kenapa seminar komunikasi seperti meng-cover semua tema. Pun dalam seminar nasional yang diselenggarakan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman, kami menerima beragam terima. Semua sebetulnya masih dalam domain ilmu komunikasi, meski ada beberapa yang dilihat judulnya seolah bicara hal yang berbeda.

Karena alasan itu pula kami memilih judul yang terasa lebih general: Gagasan Komunikasi untuk Negeri. Sebagai gagasan, kami memang berharap, tulisan para penulis yang terangkum dalam buku ini bisa berkontribusi, tidak saja secara akademik tetapi juga secara praktis. Karena di sinilah tantangan seorang cendekiawan yang sesungguhnya: menjadikan ide dan pemikirannya membumi atau relevan bagi kehidupan masyarakat.

Sebagai penyelenggara seminar, jurusan komunikasi Unsoed berterima kasih kepada para penulis yang telah mempercayakan artikelnya untuk dibukukan. Semoga kerjasama akademis ini bisa terus terjalin di masa-masa mendatang.

Dalam penyusunan buku ini, tentu banyak kelemahan dan kekurangan. Segala kritik dan masukan kiranya akan menyempurnakan karya ini.

Akhirnya, tak lupa juga ucapan terima kasih untuk segenap pimpinan fakultas ISIP Unsoed dan Jurusan Komunikasi Unsoed atas segala dukungan dan fasilitasnya. Selamat membaca!

Purwokerto, 21 September 2020

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR --iii

DAFTAR ISI --iv

BAB 1. KOMUNIKASI SOSIAL DAN POLITIK --7

Komunikasi Untuk Mengkampanyekan Budaya Lingkungan --8
Pemberdayaan Sebagai Solusi Baru Dalam Pembangunan ---13
Strategi Komunikasi Politik Homofili Ormas Muhammadiyah --21
Praktik Korupsi Komunikasi Di Lingkaran Konglomerasi Media ---37
Retorika Visual Dalam Proses Komunikasi Lingkungan --56
Hilangnya Hak Anak Atas Televisi --71

BAB 2. PEMASARAN DAN KEHUMASAN --79

Hubungan Media Informasi dan Kegiatan Pemasaran Rumput Laut ---80
E-Commerce: Peluang Dan Tantangan Bagi Wirausahawan Disabilitas --86
Peranan 'Digital Branding' Dalam Pengembangan Potensi Perusahaan ---94
Pemanfaatan Media Pada Strategi Komunikasi Pemasaran --108
Branding Pemasaran Politik Joko Widodo Versus Prabowo Subianto ---119
Korelasi Antara Strategi Iklan Humor dan Pemahaman Pesan Pelanggan --131
Urgensi Pemanfaatan Media Sosial Bagi Terciptanya Meaningfull Digital Marketing Perguruan Tinggi Swasta Di Tengah Pandemi --142
Pengembangan Peran Public Relations Dalam Media Sosial ---152

BAB 3. KEBIJAKAN DAN KOMUNIKASI --163

Strategi Komunikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Membentuk Dan Menjaga Citra Organisasi Menggunakan Media Sosial Twitter ---164
Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Layanan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ---173
Komunikasi Dan Mitigasi Berita Bohong Di Media Sosial Oleh Pemerintah --184
Pengaruh Teknologi dan Komunikasi Terhadap Pencegahan Korupsi --192
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Akselerasi Smart ASN Dalam Pelayanan Publik --202
Campur Tangan Pemerintah Dalam Mengatasi Duopoli Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia ---215
Magis Jalan Tol, Etalase Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur ---225
Pola Komunikasi Kebencanaan Program Destana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Purworejo --235

BAB 4. PSIKOLOGI KOMUNIKASI DAN KELUARGA --239

Upaya Ibu Single Parent Dalam Membentuk Konsep Diri Anak Remaja --240
Peran Panti Asuhan Dalam Pemberdayaan Anak Asuh --245
Konstruksi Makna Hijrah Anggota Komunitas Teman Hijrah ---253

Keterbukaan Diri Orang Dengan HIV/AIDS dalam Kelompok Dukungan Sebaya "Moving On" ---263
Hubungan E - Konseling Akun Line @Curhatalpas dan Kepuasan Pelayanan Kesehatan Mental Penggunanya --272
Bimbingan Dan Konseling : Komunikasi Interpersonal Remaja Pengguna Media Sosial --281

BAB 5. DINAMIKA MEDIA BARU --293

Komunikasi Jemaat Gkj Purwokerto Dalam Group Whatsapp --294
Komodifikasi Pekerja Lepas Di Industri Media Online --303
Desk Research Aliran Informasi Melalui Media Whatsapp --317
New Media Dalam Pertarungan Pendekatan Organik Vs Mekanik ---329
Pemanfaatan Fanpage Humas Gubernur Sumatera Utara --337
Komodifikasi Identitas Wilayah Pada Akun @Infoserang --342
Komodifikasi Ketokohan Konten Siaran Youtube Influencer --349
Pola Interaksi Virtual Akun Twitter @Catwomanizer ---366
Perbincangan Jamaah Muslimat Di Aplikasi Whatsapp ---373
Dramaturgi Mahasiswa Purwokerto Di Media Sosial Instagram ---379
Interaksi Sosial Anggota Komunitas Pecandu Buku ---384
Layanan Pengguna Transportasi Online Di Era Teknologi Digital --390
Motivasi Dan Tantangan Guru Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi Covid-19 --398
Kecanggihan Teknologi Komunikasi pada Lembaga Pendidikan Sekolah --403
"Mino Voice" sebagai Wadah Korban Kekerasan Seksual --408
Sinergi Perkembangan Teknologi Komunikasi Sebagai Sebuah Solusi --424

BAB 5

DINAMIKA MEDIA BARU

NEWMEDIA DALAM PERTARUNGAN PENDEKATAN ORGANIK VS MEKANIK

Oleh
Shinta Prastyanti

Seringkali terdengar dan disampaikan di berbagai media massa bahwa angka kemiskinan pada suatu negara masih tergolong tinggi padahal berbagai upaya untuk meringankan kemiskinan sudah dilakukan. Pernyataan tersebut menyiratkan beberapa hal diantaranya adalah: 1) kemiskinan masih menjadi perhatian utama dan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait, 2) belum ditemukannya strategi komunikasi yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan, tidak hanya secara statistik saja namun juga pada tataran praksis di lapangan. Di sisi lain perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa dapat menjadi satu peluang dalam upaya pengentasan kemiskinan, terlepas dari berbagai kendala yang mungkin timbul.

Pada poin pertama yang menyiratkan kemiskinan masih menjadi agenda yang belum terselesaikan dibuktikan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang berada dalam kategori miskin. Menurut von Braun (2008) jumlah penduduk miskin di seluruh dunia dengan indikator pendapatan di bawah US \$ 50 cent/ kapita/ hari sebanyak 162 juta yang sebagian besar tersebar di Sub Sahara Africa. Sementara di Indonesia, menurut data terbaru dari BPS, pada bulan Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,7 juta atau bertambah 6900 orang dari tahun sebelumnya (BPS, 2017).

Angka kemiskinan yang masih besar baik dalam skala dunia maupun di Indonesia menunjukkan bahwa berbagai upaya pengentasan kemiskinan belum mampu membuahkan hasil yang maksimal padahal anggaran yang telah dikeluarkan tidaklah sedikit. Sebut saja PNPM Mandiri Perdesaan di Indonesia misalnya, kemudian *Rural Non-Farm Economy* (RNFE) yang menekankan pada pembagian keuntungan, pertumbuhan tenaga kerja, dan lain-lain (Haggblade, Steven, et. al, 2010), *the Poverty Eradication Action Plan* (PEAP), yang merupakan subkomponen dari PEAP adalah *the Plan for the Modernization of Agriculture* (PMA) di Uganda (Bahigwa, Godfrey, et.al ., 2005; Francis, Paul and Robert James, 2003; Ellis, Frank & Godfrey Bahigwa, 2003). *The Poverty Reduction Strategy Paper* (PRSP) dan desentralisasi pemerintahan di Malawi merupakan contoh lain dari upaya pengentasan kemiskinan (Ellis, Frank, et al, 2007). Meski diklaim bahwa program-program tersebut berhasil mengurangi angka kemiskinan dengan terbangunnya berbagai infrastruktur dan fasilitas lainnya namun nyatanya angka kemiskinan masih

relatif tinggi.

Kondisi di atas menunjukkan belum maksimalnya strategi-strategi pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan yang tentu saja menimbulkan kegelisahan tidak hanya bagi pemerintah namun juga seluruh elemen masyarakat. Implementasi berbagai strategi tersebut tentu saja telah menghabiskan banyak dana dengan hasil yang belum sepadan. Hal tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang bisa jadi dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di perdesaan. Apa yang salah dalam program-program pengentasan kemiskinan perdesaan yang selama ini telah dilakukan? Bagaimanakah sebenarnya keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan tersebut? Bagaimana pula sebenarnya strategi komunikasi yang tepat untuk menghubungkan simpul-simpul diantara para *stakeholder* tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hadir karena adanya semangat keingintahuan mengenai strategi komunikasi pembangunan seperti apa yang tepat yang dapat dilaksanakan guna mengentaskan kemiskinan di perdesaan mengingat dewasa ini kehadiran teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat diabaikan. Piranti ini berpeluang menjadi jembatan untuk mengatasi “kebuntuan” mengalirnya arus informasi sehingga program pengentasan kemiskinan dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Pendekatan Organik Vs Mekanik

Selama beberapa dekade disuguhkan dua pendekatan pembangunan yang seolah menjadi panglima bagi negara-negara di bumi ini khususnya negara berkembang dalam menjalankan roda pembangunannya. Pada jamannya masing-masing, kedua pendekatan ini menjadi pilihan terbaik sehingga tidak sedikit negara yang berkiblat pada salah satu pendekatan tersebut. Indonesia misalnya, pada jaman orde baru pendekatan mekanik dirasa yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan pada saat itu. Namun di kemudian hari ketika dibutuhkan keberpihakan pada masyarakat dalam proses pembangunan maka model yang bersifat mekanik diganti dengan pendekatan organik.

Perdebatan mengenai kedua pendekatan di atas disampaikan oleh Servaes dalam salah satu bukunya yang berjudul *Communication for Development and Social Change* (2008). Dalam buku tersebut disampaikan bahwa pendekatan mekanik yang bersifat satu arah menjadikan proses komunikasi bersifat linear. Memang benar bahwa dalam model ini pesan dapat disampaikan dengan cepat, namun tidak ada kepastian bahwa pesan tersebut sampai atau bahkan dapat difahami oleh khalayak. Proses komunikasi berjalan satu arah, dari media massa pada pemimpin opini dan pemimpin opini meneruskannya pada masyarakat. Laju pesan pembangunan bersifat mekanis, seperti mesin sehingga masyarakat dianggap sebagai robot, sebagai pihak-pihak yang dengan mudahnya dapat ditembak dengan pesan-pesan pembangunan tanpa

mempertimbangkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kecerdasan dan emosi.

Pendekatan yang mengemuka pada model komunikasi ini adalah difusi inovasi. Model difusi ini melalui 4 fase dimulai dari pengumpulan informasi, pembuatan strategi, implementasi, hingga evaluasi yang keempatnya merupakan fase dalam Model Proses Development Support Communication (DSC). Model yang kedua menggunakan pendekatan multi media yang terdiri dari media antar pribadi maupun media massa seperti halnya radio pedesaan. Ketiga, menggunakan strategi kampanye yang dianggap strategi yang efektif karena menggabungkan berbagai saluran komunikasi, sedangkan yang berikutnya adalah pelatihan dan penelitian.

Pendekatan ini terjadi ketika pemerintah pusat menjadi *stakeholder* atau pemain utama dalam kebijakan-kebijakan yang diambil termasuk diantaranya yang berkaitan dengan program-program pembangunan. Pemerintah pusatlah yang menyusun program-program pembangunan secara lengkap hingga yang bersifat teknis (Soetomo, 2006). Hal senada juga disampaikan oleh Sabathier. Menurut Sabathier (1986), pendekatan organik/ *top down* bermula dengan pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, seringkali oleh pemerintah pusat. Dominasi pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat menjadikan kebijakan yang diambil mempunyai beberapa aspek positif yang tidak dapat ditemukan pada pendekatan *bottom up* atau pendekatan mekanik, terutama dalam kaitannya dengan keberlanjutan program.

Berdasarkan pendapat Soetomo dan Sabathier tersebut dapat diketahui bahwa pendekatan organik (*top down*) memiliki kelebihan dalam hal kecepatan penyelesaian program dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan karena masyarakat tinggal melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Intervensi pemerintah pusat menjadikan keberlangsungan program pembangunan lebih terjamin karena sumber dana dan sumber daya tidak lagi menjadi hambatan. Pemerintah juga memberikan dukungan penuh dalam penyediaan infrastruktur pendukung. Mengapa keberlanjutan program menjadi salah satu andalan bagi pendekatan organik? Lebih lanjut Sabathier (1986) menekankan bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) tujuan yang jelas dan konsisten, (2) teori yang memadai, (3) proses pelaksanaan secara terstruktur yang sah untuk meningkatkan pemenuhan kelompok-kelompok sasaran, (4) tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan dan komitmen, (5) dukungan dari berbagai kelompok kepentingan termasuk dari asing, serta (6) perubahan kondisi sosial ekonomi yang secara substansial tidak melemahkan dukungan politik.

Karakteristik-karakteristik diatas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan program pembangunan pemerintah pusatlah yang memegang kendali sehingga pemerintah daerah benar-benar hanya sebagai pelaksana segala instruksi yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Lebih jauh lagi, intervensi pemerintah pusat yang besar dapat menjadi sebuah jaminan atas keberlanjutan

program pembangunan tersebut khususnya dalam kaitannya dengan sumber daya dan sumber dana. Pendekatan ini memungkinkan cepatnya penyelesaian program pembangunan terlepas dari kesesuaiannya dengan kebutuhan khalayak sasaran. Lantas di mana posisi masyarakat? Apakah masyarakat diberikan peran untuk berpartisipasi dalam pembangunan? Dalam pendekatan ini ternyata masyarakat yang seharusnya menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan kedudukannya hanyalah sebatas sebagai ‘penonton’ dan obyek dari pembangunan itu sendiri.

Meskipun di satu sisi pendekatan ini dapat mempercepat proses pembangunan, namun pendekatan ini mendapatkan berbagai kritik. Dominasi yang besar dari pemerintah pusat cenderung mengorbankan keterlibatan pihak lain termasuk masyarakat. Dalam kondisi ini pendekatan organik sulit diimplementasikan ketika tidak ada aktor yang dominan (Hjern and Hull, 1982; Hanf, 1982, Barret and Fudge, 1981; Elmore, 1979), seperti halnya strategi-strategi yang digunakan pada tingkat birokrasi di lapangan dan kelompok sasaran untuk bisa memasuki pusran lingkaran (pusat kekuasaan) dan mengalihkannya untuk kepentingan diri mereka sendiri (Weatherly and Lipsky, 1977; Elmore, 1978; Berman, 1978).

Di sisi lain, jauh berbeda dengan pendekatan mekanik, pendekatan organik lebih mendasarkan pembangunan pada aspek masyarakat. Masyarakat menurut pendekatan ini merupakan pihak-pihak yang harus diakui keberadaannya dan dilibatkan dalam proses pembangunan. Dalam pendekatan ini pemerintah tidak lagi menjadi superior dan aktor utama dalam pembangunan. Terjadi pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat ke masyarakat. Selain itu juga menjalin kontak dengan aktor-aktor baik yang bersifat lokal, regional, maupun nasional yang terlibat sejak tahap perencanaan, pembiayaan, dan menentukan program-program yang cocok dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Mekanisme ini merupakan sebuah alur yang berawal dari birokrasi di tingkat bawah hingga pada pengambil kebijakan di tingkat puncak baik pada sektor publik maupun swasta (Hejrn et al, 1978; Hejrn and Porter, 1981; Hjern and Hull, 1985). Paparan di atas memberikan pemahaman mengenai perubahan posisi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat tidak lagi hanya sekedar menjadi pelengkap penderita, akan tetapi keberadaannya diakui dan dianggap menjadi satu poin yang sangat penting yang dapat ikut menentukan berhasil tidaknya program pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Soetomo (2006) pendekatan mekanik memiliki beberapa kekuatan dalam hal fleksibilitasnya. Pendekatan ini memang tidak mengizinkan campur tangan pemerintah sepanjang hal tersebut menjadikan ketergantungan masyarakat pada pemerintah. Keikutsertaan pemerintah lebih pada memberikan stimulus/rangsangan yang dapat mewujudkan harapan dan menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh Honadle and VanSant (1988) yang menambahkan bahwa intervensi pihak luar hanya memberikan kontribusi pada institusi-institusi lokal yang baru muncul sehingga institusi baru tersebut dapat bertahan. Meskipun berdasarkan

pendapat Honadle dan VanSant tersebut masih memungkinkan adanya kesempatan bagi pihak luar untuk melakukan intervensi, namun campurtangan pihak luar tidaklah sebesar pada pendekatan organik. Pada pendekatan ini masyarakatlah yang menjadi aktor utama pembangunan, sehingga masyarakat juga memiliki kesempatan yang sangat luas untuk terlibat dan mewarnai program pembangunan yang dilaksanakan.

Mengabaikan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan termasuk dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan hanya akan membuat program pembangunan tersebut kurang sesuai dengan kenyataan yang dihadapi dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pada masyarakat yang bersifat heterogen. Rasanya sulit membuat pembangunan menjadi lebih mampu merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat ketika masih mempergunakan pendekatan yang sifatnya terpolo dan terkontrol. Berkaitan dengan hal tersebut, Korten (1987) berpendapat bahwa pengembangan masyarakat tidak dapat terpusat ketika terdapat variasi lokal, sumber daya, serta tanggungjawab

Namun pendekatan ini bukan berarti tidak beresiko. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan dengan perspektif masing-masing berpotensi memunculkan konflik dan lebih jauh lagi pembangunan berjalan lebih lambat. Membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menyamakan pandangan diantara berbagai elemen masyarakat dengan masing-masing kepentingan yang mengikutinya.

***New media* sebagai Strategi Komunikasi Pembangunan Baru**

Strategi merupakan pengertian yang luas dan banyak pakar menyamakan pengertian strategi dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah David (2006) yang menjelaskan strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Senada dengan David, Stephanie K. Marrus dalam Umar (2002) juga melihat strategi dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan jangka panjang. Hanya saja Stephanie secara lebih detil menjelaskan bahwa strategi tersebut harus disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Tidak berbeda jauh dengan pendapat-pendapat sebelumnya, strategi komunikasi menurut Effendy (2016) merupakan panduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat Effendy menyiratkan betapa pentingnya sebuah strategi komunikasi dalam upaya mencapai tujuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan tidak dapat tercapai secara maksimal tanpa adanya strategi yang tepat.

Dalam konteks pembangunan, strategi komunikasi yang lebih dikenal sebagai strategi komunikasi pembangunan merupakan aktivitas komunikasi yang mensupport pembangunan. Namun demikian bukan berarti posisi strategi komunikasi dalam proses pembangunan tidak menjadi penting. Berbicara mengenai strategi komunikasi pembangunan khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan tidak bisa dilepaskan dari dua pendekatan besar yakni pendekatan mekanik dan pendekatan

organik. Seperti yang telah disampaikan pada poin sebelumnya bahwa kedua pendekatan tersebut merupakan pilihan terbaik di jamannya. Akan tetapi untuk kondisi sekarang penerapan salah satu pendekatan dari kedua pendekatan secara saklek tampaknya menjadi kurang tepat lagi. Kondisi tersebut tentu saja membutuhkan penyelesaian sehingga dapat menjadi solusi atau jalan tengah untuk mengatasi kekurangan yang ada pada kedua pendekatan tersebut.

Kehadiran dan perkembangan yang luar biasa akan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet tampaknya memunculkan janji dan harapan baru dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan. *New media* dianggap efektif dalam menyebarkan berbagai pesan bagi masyarakat luas pada waktu yang sama dibandingkan media komunikasi lainnya. Luasnya cakupan wilayah serta tingkat interaktifitasnya yang tinggi dari *new media* tidak lepas dari kemampuan unik yang dimilikinya yakni *modelling* dan *processing, multi-channel communication*, serta *anonymity* (Leeuwis & Ban, 2004). Karakteristik *new media* sebagai media baru tersebut memberikan kemudahan pada berbagai pihak baik pemerintah maupun pihak terkait lainnya dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Di sisi lain juga membukakan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya baik secara horisontal maupun vertikal. Selain itu masyarakat baik secara individu maupun kelompok juga mempunyai hak untuk memanfaatkan media dan dilayani oleh media sesuai dengan kebutuhannya (McQuail, 1996).

Pendapat-pendapat di atas menyiratkan bahwa media baru ini membukakan wacana baru dalam strategi komunikasi pembangunan khususnya pengentasan kemiskinan di perdesaan dan dapat menjembatani kedua pendekatan yang bertolak belakang. *New media* dapat menjadi jalan tengah ketika proses pembangunan yang dijalankan membutuhkan kecepatan. Pesan-pesan yang disampaikan melalui *new media* ini memungkinkan untuk mencapai khalayak dalam waktu yang cepat dan bersamaan. Di sisi lain, ketika dibutuhkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan di perdesaan, *new media* juga mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide dan pendapatnya karena komunikator dalam *new media* tidak harus sebuah lembaga seperti halnya pada media komunikasi massa dan tidak memerlukan prosedur yang lama dan rumit. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kapan saja tanpa ada rasa ewuh pakewuh seperti halnya ketika harus bertemu secara tatap muka.

Penutup

Pertarungan dua pendekatan yang bertolak belakang dalam pembangunan khususnya pengentasan kemiskinan di perdesaan dengan berbagai kelebihan dan kelemahan masing-masing tidak menjadikan upaya pengentasan kemiskinan di perdesaan menjadi berhenti. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan di perdesaan harus terus berjalan seiring dengan kebutuhan dan peluang-peluang baru yang tercipta

yang dimanage sedemikian rupa dalam sebuah strategi komunikasi pembangunan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi memunculkan harapan baru dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di perdesaan yang tentu saja harus diikuti dengan identifikasi permasalahan dan potensi solusi yang dimungkinkan dan mengemasnya dalam sebuah rumusan strategi komunikasi pembangunan yang tepat.

New media dengan sifat dan karakteristiknya hadir dan berpeluang memberikan solusi atas kebuntuan dari kedua pendekatan tersebut. New media mampu diandalkan dalam hal kecepatan penyampaian pesan dan juga tidak mengabaikan keberadaan masyarakat. Masyarakat justru memiliki ruang yang terbuka untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya sehingga masyarakat tetap dapat menjadi bagian yang penting dalam strategi komunikasi pembangunan.

Daftar Pustaka

- Bahiigwa, Godfrey, et.al. 2005. Right Target, Wrong Mechanism?. Agricultural Modernization and Poverty Reduction in Uganda. [World Development](#) 33 (3): 481-496
- Barret, Susan and Fudge, Colin, eds. (1981). Policy and Action. London: Methuen
- Berman, Paul (1978). 'The Study of Macro-Micro Implementation', Public Policy 26: 157-84
- David, Fred R. 2006. *Manajemen Strategis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2016. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Cetakan ke-27. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Ellis, Frank & Godfrey Bahiigwa, 2003. Livelihoods and Rural Poverty Reduction in Uganda. [World Development](#) 31 (6): 997-1013
- Ellis, Frank, Milton Kutengule & Alfred Nyasulu., 2007. Livelihoods and Rural Poverty Reduction in Malawi. [World Development](#) 31 (9): 1495-1510
- Elmore, Richard (1978). 'Organisational Model of Social Program Implementation', Public Policy 26 (Spring): 185-228
- Francis, Paul & Robert James, 2003. Balancing Rural Poverty Reduction and Citizen Participation: The Contradictions of Uganda's Decentralization Program. [World Development](#) 31 (2): 325-33
- Haggblade, Steven, Peter Hazel & Thomas Reardon, 2010. The Rural Non-farm Economy: Prospects for Growth and Poverty Reduction. [World Development](#) 38 (10): 1429-1441
- Hanf, Kenneth (1982). 'The Implementation of Regulatory Policy: Enforcement as Bargaining', European Journal of Political Research 10 (June 1982): 159-72
- Hejrn, Benny and Porter, David (1981). 'Implementation Structure: a New Unit of administrative analysis, Organisation Studies 2: 211-227

- _____and Hull, Chris (1982). 'Implementation Research as Empirical Constitutionalism', *European Journal of Political Research* 10 (June1982): 105-18
- Kleine, Dorothea and Tim Unwin. 2009. Technological Revolution, Evolution, and New Dependencies: what's new about ict4d?. *Third World Quarterly* 30 (5): 1045-1067
- Leeuwis, Cees & Ban, Anne van den, 2004. *Communication for Rural Innovation. Rethinking Agricultural Extension*. Third Edition. Blackwell Publishing Ltd
- McQuail, Dennis, 1996. *Teori Komunikasi Massa. Suatu Pengantar*. Edisi Kedua. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Sabathier, Paul A, 1986. 'Top-Down and Bottom-Up approaches to Implementation Research: a Critical analysis and Suggested Synthesis, *Journal of Public Policy* 6 : 21-48
- Servaes, Jan, 2008. *Communication for Development and Social Change*. Sage Publications India Pvt Ltd: New Delhi
- Shepherd, A, 1998. *Sustainable Rural Development*. Macmillan. Basingstoke and London
- Soetomo, 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Tjokrowinoto, Mulyarto, 1991. *Makna dan Logika Pengelolaan Sumberdaya*. Makalah. Yogyakarta: PAU- SS UGM
- Umar, Husein. 2002. *Strategic Management in Action*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- von Braun, Joachim, 2008 in Josef Lorenz. *ICT for The Next Five Billion People*. Paperback
- Weatherly, Richard and Lipsky, Michael (1977). 'Street Level Bureaucrats and Institutional Innovation: Implementing Special Education Reform, *Harvard Educational Review* 47 (2): 171-97

Sumber lain:

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>, diakses 20 Mei 2018

Tak ada ruang kehidupan yang berlalu tanpa kehadiran komunikasi. Maka membicarakan komunikasi sejatinya adalah membicarakan kehidupan itu sendiri. Inilah kenapa membicarakan komunikasi seperti membicarakan berbagai tema . Seperti gado-gado

Aneka ragam tema itu Anda bisa temukan dalam buku ini. Sebagai sebuah praktik, komunikasi memang hadir dalam berbagai konteks, mulai dari interpersonal, kelompok, hingga komunikasi bermedia (massa/ online).

Keragaman tema ini barangkali menggambarkan persoalan hidup kita sehari-hari. Persoalan Bersama yang dihadapi anak bangsa. Mulai dari masalah pribadi, organisasi, masyarakat, hingga pemerintahan.

Buku ini semata sebuah ikhtiar untuk berbagi gagasan dan solusi. Sebagian besar merupakan hasil penelitian, sehingga datanya layak dipertanggungjawabkan. Sebuah kontribusi untuk negeri.

ISBN 978-623-92303-5-7

